

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, M. (2020). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, I. (2020). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, S. A. (2020). *Hukum kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana / Prenada Group.
- Nugroho, S. S, A. T. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Rahayu, M. (2021). *Panduan Praktis Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rusli, T. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandar Lampung (UBL) Press: Universitas Bandar Lampung. Hlm. 129-137.
- Sriwidodo, J. T. (2024). *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sutiyoso, B. (2021). *Keuntungan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa*. Depok: Universitas Indonesia Press.
- Untung, B. (2019). *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yitawat, K. P. A. (2022). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Yogyakarta: Deepublish Digital. hlm. 86-93.
- Yudhoyono, A. (2023). *Hukum Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1998, tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu RI) Nomor 1

Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi Undang- Undang. Eksemplar Negara Tahun 1998 Nomor 87, Tambahan Eksemplar Negara Nomor 3761.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Eksemplar RI Nomor 131 Tambahan Eksemplar Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Eksemplar Negara Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Eksemplar Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Eksemplar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Eksemplar Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang Penyelesaian Pembayaran Upah Buruh

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Kepailitan dan PKPU

Jurnal

Budi, R. (2021). Prosedur Penjualan Aset dalam Kepailitan. *Yuridika*, Vol.28, No.4.

Fitria, Y. (2021). Peran Kurator dalam Pengelolaan Kepailitan. *Jurnal Studi Hukum*, Vol.15, No.3.

Gultom, W, T. S. (2023). Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

Hamonangan, A, M. A. (2021). Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA*, vol.2, no.1.

Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 1.

Haris, A. (2021). Manajemen Kepailitan dan Perlindungan Kreditur. *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.15, No.2.

- Leonard, T, Y. C. (2023). Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Iblam Law Review*, Vol.3, No.3, Hlm. 499-514.
- Ndoen, M. R, C. D. (2024, Maret). Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Pailit. *Paulus Law Journal*, Volume 5, Nomor 2. Diambil kembali dari Paulus Law Journal.
- Raharja, N. B, A. G. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2.
- Rizal, M. (2023). Tantangan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan. *Jurnal Hukum dan Kepailitan*, Vol.17, No.4.
- Samsudin, N. (2021). Perencanaan Pembayaran Utang oleh Kurator. *Jurnal Studi Kepailitan*, Vol.14, No.2.
- Saputra, I. E. (2020). Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* , Vol.23, No.2, Hlm.155–166.
- Sihombing, H. T, I. H. (2021). Analisis Yuridis Kedudukan Upah Pekerja pada Perusahaan yang Pailit Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. *Delegasi Legal Student Scientific*, Vol.1, No.1, Hlm. 40-57.
- Simanjuntak, J. (2023). Tinjauan Hukum atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Honeste Vivere Journal*, Volume 33, Issue 1.
- Suhadi, E. (2023). Akibat Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi. *Hukum dan Keadilan*, Volume 10, Nomor 1.
- Sulaiman, D. (2022). Akuntabilitas Kurator dalam Proses Kepailitan. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol.18, No.2.
- Zulkarnain, D, M. M. (2024). Kepastian Hukum Aakta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator Atas Harta Debitur Pailit Dan Akibat Hukumnya. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol.3, No.3

Website

Khotimah, N. (2024, Mei 23). *Peluang dan Tantangan dalam Hukum Kepailitan*.

Diambil kembali dari Timelines.id:

https://timelines.id/2024/05/23/peluang-dan-tantangan-dalam-hukum-kepailitan/#google_vignette

Kumalasari, R. (2022, April 14). *Kreditur: Pengertian, Jenis, dan Contoh-Contohnya*. Diambil kembali dari Majoo:

<https://majoo.id/solusi/detail/kreditur-adalah>

Norton, N. (2024, Maret 22). *Litigasi vs. Arbitrase: Apa Bedanya?* Diambil kembali dari Korum new law:

<https://www.korumlegal.com/blog/litigation-vs.-arbitration-whats-the-difference>

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Djoko Pitono, S.H.,CN. selaku Kuasa Hukum PT. Tatamulia Nusantara Indah di Kantor Hukum AZ&Partners pada tanggal 2 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak Agung Boedhiantara, S.H. selaku Kurator dalam Perkara PKPU dan Kepailitan PT. Tatamulia Nusantara Indah dan PT. Pisma di Kantor AHP Legal pada tanggal 8 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Basjori selaku Legal Konsultan PT. Tatamulia Nusantara Indah pada tanggal 12 Juli 2024.